

DINAMIKA PERGESERAN KEKUASAAN POLITIK DI DPD PARTAI DEMOKRAT PROVINSI RIAU

Deny Rendra dan Hery Suryadi

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Dynamics of Political Power Shifts in the Democratic DPD Riau Province. This study aimed to determine the ouster heads DPD Partai Demokrat period 2004-2009 and to identify and analyze the factors that led to the ouster heads DPD Partai Demokrat period. The study was designed by the method of qualitative and descriptive research conducted in DPD Partai Demokrat. Primary information sources (informants) were determined by using purposive informant and the necessary data were collected by interview and documentation. Based on the research and analysis of the research data it can be seen that the dynamics of the shift of political power in the DPD Partai Demokrat is a purely internal conflict of the party elite. The conflict can be reduced to the conflict between groups for not terakomodirnya elite interests.

Abstrak: Dinamika Pergeseran Kekuasaan Politik di DPD Partai Demokrat Provinsi Riau. Studi ini bertujuan untuk mengetahui proses pelengseran ketua-ketua DPD Partai Demokrat Riau kurun waktu 2004-2009 dan untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelengseran ketua-ketua DPD Partai Demokrat pada kurun waktu tersebut. Studi ini didesain dengan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan di DPD Partai Demokrat Riau. Sumber informasi primer (informan) ditentukan dengan teknik *purposive informant* dan data-data yang diperlukan dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data penelitian dapat diketahui bahwa dinamika pergeseran kekuasaan politik di DPD Partai Demokrat Riau merupakan murni konflik internal elite partai. Konflik itu dapat direduksi dalam konflik antar kelompok karena tidak terakomodirnya kepentingan elite.

Kata Kunci: Konflik, kekuasaan, dan partai politik

PENDAHULUAN

Konflik dalam setiap peristiwa politik berakar pada perebutan kekuasaan, sebab itu “kuasa” merupakan kata kunci untuk melihat lebih jauh sumber-sumber konflik yang terjadi. Pertarungan kekuatan-kekuatan politik merupakan pencarian akan kekuasaan. Kekuasaan bukanlah suatu wilayah melainkan suatu bentuk dan kondisi esensial dalam hubungan kemanusiaan. Oleh karena itu cara memahami kompleksitas kekuasaan dalam setiap peristiwa politik harus juga dilihat dari berbagai macam dimensi, baik material, psikologis, sosial yang diperebutkan oleh manusia yang terlibat di dalamnya.

Titik tengkar dalam peristiwa politik berasal dari klaim atas dukungan dan klaim kebenaran yang diyakini oleh masing-masing pihak. Di samping itu, dominasi suatu kelompok tertentu terhadap ruang publik, sehingga mempersempit ruang pihak lain untuk memberikan artikulasi

politik pada khalayak akan menimbulkan kecemburuan politik, yang pada akhirnya melahirkan pertikaian kepentingan antar kelompok maupun individu.

Partai politik secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat secara umum. Sebab mandat sosial yang telah diberikan konstituen/rakyat pada waktu sejarah kelahirannya dan pada setiap kali pemilihan umum tentu mengharuskan partai politik untuk berpihak kepada kepentingan rakyat. Tujuan mulia yang bernilai populis tersebut terkadang tereduksi dan menjadi simplistik, apalagi partai politik itu disibukkan dengan konflik internalnya masing-masing. Salah satunya adalah konflik internal pergeseran kekuasaan politik di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Riau kurun waktu 2004-2009 yang menjadi fokus penelitian ini.

Partai Demokrat sebagai sebuah partai politik yang lahir pasca lengsernya kekuasaan Orde Baru tentunya juga menghadapi tantangan sedemikian rupa sebagaimana gambaran persoalan di atas. Tantangan yang dihadapi oleh Partai Demokrat adalah bagaimana menjalin konsolidasi partai sampai pada tingkat yang paling bawah sehingga terbangun suatu tatanan internal partai yang kuat dan terarah. Persoalannya adalah sebagaimana partai politik lainnya, Partai Demokrat juga tidak urung dari persoalan konflik yang melanda internal partai.

Partai yang didirikan tanggal 9 September 2001 itu kemudian menjelma menjadi sebuah kekuatan politik besar di Indonesia. Setelah menduduki peringkat ketujuh pada Pemilihan Umum tahun 2004, Partai Demokrat mampu menjadi pemenang pada Pemilihan Umum tahun 2009 dengan mengantongi lebih dari 20% perolehan suara. Tingginya angka elektabilitas terhadap Partai Demokrat memunculkan beragam spekulasi di tengah-tengah masyarakat, utamanya adalah pada tingkat konsolidasi dan pelembagaan partai. Sebab sebagian kalangan menilai bahwa Partai Demokrat merupakan partai yang lahir *premature* dan menderita *giantisme* dan rawan terhadap penyakit sebagaimana yang melanda partai-partai lain di Indonesia.

Kekhawatiran itu berbanding lurus dengan kondisi empirik yang ada di daerah. Banyak kepengurusan partai di tingkat daerah mengalami konflik internal. Salah satu yang patut disoroti adalah konflik internal di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Riau. Konflik internal yang berkembang di DPD Partai Demokrat Provinsi Riau adalah pergeseran kekuasaan pimpinan partai di daerah dalam konteks ini adalah penggantian Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau.

Kemelut internal DPD Partai Demokrat Provinsi Riau dapat dibagi ke dalam tiga tahap oleh karena proses perkembangannya berjalan berdasarkan ritme terjadinya gejolak dan peristiwa politik internal di DPD Partai Demokrat Provinsi Riau. Menurut penulis, tiga tahap ini merupakan tahap paling menentukan dalam

usaha konsolidasi partai utamanya dalam menghadapi suasana politik yang berkembang. *Perdana*, tahap setelah terbentuknya DPD Partai Demokrat Provinsi Riau (2003-2004), pasca terbitnya mandat pembentukan DPD Partai Demokrat Provinsi Riau oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dalam Surat Mandat DPP Partai Demokrat Nomor: 02/PD/DPD-95/IV/2003. *Kedua*, tahap pasca musyawarah daerah pertama Partai Demokrat Provinsi Riau di Rengat pada tahun (2006-2009). *Ketiga*, adalah tahap pasca musyawarah daerah luar biasa Partai Demokrat Provinsi Riau di Pekanbaru pada tahun 2009.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap suatu kejadian atau peristiwa (penelitian studi kasus), sehingga diperlukan penelitian untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang memfokuskan analisis pada kejadian atau peristiwa yang mengandung masalah atau perkara. Penelitian studi kasus tentu saja memerlukan metode penelitian sebagaimana penelitian-penelitian dalam bentuk lain. Penelitian ini memberi tekanan pada penggunaan metode kualitatif deskriptif. Satuan analisis dalam penelitian ini adalah pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Riau dan anggota masyarakat yang dianggap memahami dinamika pergeseran kekuasaan yang terjadi di DPD Partai Demokrat Provinsi Riau kurun waktu 2004-2009, seperti tokoh informal, pengamat politik, dan media massa, dijadikan sebagai informan kunci dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemelut Internal

Kemelut Internal 2003-2004 (Tahap I)

Sebagai sebuah partai politik baru, Partai Demokrat tentunya dihadapkan pada masalah konsolidasi dan koordinasi partai mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Konsolidasi partai hanya dimungkinkan ketika kondisi partai sudah stabil dan berjalan dengan baik. Gejolak konflik

internal yang melanda Partai Demokrat di Riau pasca terbitnya SK pengangkatan pengurus sementara Partai Demokrat Provinsi Riau oleh DPP Partai Demokrat melalui SK No. 42/SK/DPP/DPD/IX/03 menjadi tantangan awal bagi Partai Demokrat di Riau dalam mewujudkan konsolidasi partai di daerah.

Terbitnya Surat Keputusan No. 42/SK/DPP/DPD/IX/03 itu merupakan refisi atas SK No. 34/SK/DPP/DPD/IX/03 tentang pengangkatan pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Riau sampai menjelang terpilihnya kepengurusan yang baru dalam Musyawarah Daerah (Musda). Terbitnya SK No. 42/SK/DPP/DPD/IX/03 itu lah kemudian yang menjadi perdebatan atas legalitas pimpinan Partai Demokrat Provinsi Riau. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau melalui surat yang ditujukan kepada DPP Partai Demokrat tanggal 27 Agustus 2003 meminta kepada DPP untuk mengeluarkan SK pengangkatan pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Riau yang baru hasil *reshuffle* kepengurusan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau.

Mosi tidak percaya terhadap kepengurusan dalam SK No. 42 itu utamanya adalah terkait dengan dihilangkannya nama-nama yang telah berjasa atas pembentukan DPD Partai Demokrat Provinsi Riau seperti Ir. Yusrizal Tanjung sendiri, Zulhusni Domo, Fauzi Ilyas dan Nafrizal Nazir dalam artian bahwa Mohd. Jenu dan kelompoknya melupakan jasa-jasa empat orang tokoh tersebut yang telah berinisiasi membentuk DPD Partai Demokrat Provinsi Riau.

Alasan kedua timbulnya mosi tidak percaya itu adalah terkait dengan penggunaan keuangan partai yang tidak jelas arahnya. Penarikan uang oleh ketua senilai Rp. 34.000.000,- tidak diketahui dengan jelas pemanfaatannya, wakil bendahara selaku pemegang kuasa keuangan waktu itu dengan terpaksa atas intimidasi ketua menandatangi cek pencairan keuangan partai sejumlah nominal tersebut. Ketua dalam hal ini tidak berupaya menguatkan keuangan partai yang semestinya mendapat dukungan dari para pengurus maupun simpatisan. Ketua seharusnya cukup memberi arah/persetujuan tentang pe-

ngeluaran uang. Alasan ketiga adalah ketua kurang memberi dukungan kepada Badan Pemenangan Pemilu sehingga BPP tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya adalah persiapan partai menjelang Pemilihan Umum sangat terbengkalai.

Klimaks dari mosi tidak percaya itu, maka diselenggarakanlah rapat kerja partai pada hari ahad tanggal 23 Mei 2004 di Wisma Mella Pekanbaru yang dihadiri oleh unsur mandator pembentukan DPD Partai Demokrat Provinsi Riau dan Pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Riau sebanyak 19 orang. Rapat yang dipimpin oleh Zulhusni Domo, H. Abuimin, Ir. Yusrizal Tanjung dan Leonidas D. Pisant itu membuat keputusan sebagai berikut;

1. Secara aklamasi peserta rapat memutuskan supaya Dr. H. Mohd. Jenu, MHA diberhentikan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Riau.
2. Keputusan pemberhentian Dr. H. Mohd. Jenu, MHA akan dikirimkan kepada DPP Partai Demokrat dan Komite Penyelamat Partai (Dewan Pendiri dan Pengurus DPD Partai Demokrat Riau).
3. Susunan pengurus DPD Partai Demokrat Riau disusun baru.

Pasca dilengserkannya Mohd. Jenu dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, maka DPD Partai Demokrat mengusulkan H. Abuimin sebagai pejabat sementara dalam surat usulan No. 72/DPD.PD/A/12/2004 yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Prof. Dr. Subur Budhisantoso. Akan tetapi surat itu tidak pernah mendapat tanggapan dari DPP, hingga akhirnya beberapa bulan kemudian seluruh pimpinan sepakat menunjuk Max Sopacula, SE menjadi karateker Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau. Tidak adanya tanggapan dari DPP tentang surat dari DPD itu mensinyalir adanya dugaan keterlibatan tim pelengseran Mohd. Jenu untuk mengamankan Jenu sebagai anggota DPRD. Artinya secara legalitas partai, Mohd. Jenu tetap sah menduduki kursi legislatif di DPRD Provinsi Riau periode 2004-2009. Hal itu dikuatkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau No. 12/KPTS/DPRD/2004 tentang Pembentu-

kan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2004 dimana Mohd. Jenu menduduki jabatan sebagai Ketua Fraksi Gabungan DPRD Provinsi Riau periode 2004-2009.

Berakhirnya era Mohd. Jenu pada tahun 2004 itu diikuti dengan munculnya era baru, yaitu pasca Jenu dengan karateker ketua Max Sopacua (2004-2006) sampai pada Musda Partai Demokrat Provinsi Riau.

Kemelut Internal 2006-2009 (Tahap II)

Musda Pertama Partai Demokrat Riau yang diselenggarakan di Rengat tanggal 22-23 Juli 2006 mengantarkan HR. Thamsir Rahman sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau untuk masa jabatan 2006-2011 yang kemudian ditetapkan dalam SK DPP Nomor 60/SK/DPP/DPD.PD/VIII/2006 tentang Susunan Nama dan Jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau.

Diselenggarakannya Musda I di Rengat menimbulkan pertanyaan baik dari kalangan pengurus DPD maupun dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) selaku pemegang hak suara waktu itu. Musda I dalam perencanaan akan diselenggarakan di Pekanbaru, akan tetapi kemudian dipindahkan ke Rengat tanpa ada alasan yang jelas dari panitia Musda. Hal itulah yang kemudian disinyalir sebagai upaya memuluskan langkah Thamsir untuk menduduki kursi DPD Partai Demokrat Riau.

Walaupun menimbulkan berbagai pertanyaan terkait dengan penyelenggaraan Musda di Rengat itu, namun Musda tetap diselenggarakan dengan sukses setidaknya melahirkan beberapa keputusan terkait dengan masa depan Partai Demokrat di Riau. Beberapa keputusan itu antara lain:

1. Pembentahan Organisasional DPD Partai Demokrat Riau dengan melengkapi seluruh biro-biro dalam struktur kepengurusan DPD Partai Demokrat Riau dalam rangka konsolidasi dan koordinasi partai di daerah.
2. Penyediaan kantor DPD oleh Ketua DPD terpilih sebagai upaya tertib administrasi.

3. Penguatan koordinasi dengan DPC-DPC dalam rangka soliditas dan militansi kader-kader di tingkat akar rumput.
4. Memilih Ketua DPD Partai Demokrat Riau yang baru, dan
5. Menyusun program-program strategis partai baik secara internal maupun eksternal partai.

Terpilihnya H.R. Thamsir Rahman sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Riau periode 2006-2011 mewarisi setidaknya dua masalah besar dalam tubuh DPD Partai Demokrat Riau waktu. Yaitu, *pertama*, masalah akomodasi kepentingan elite-elite yang dilengserkan pada masa kepemimpinan Jenu karena sebagian besar elite-elite itu masih berada dalam lingkungan kepengurusan DPD Partai Demokrat Riau. Kelompok Mohd. Jenu tentunya tidak mau tinggal diam dengan pelengseran Jenu selaku Ketua DPD Partai Demokrat waktu itu. *Kedua*, masalah penataan organisasional Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Riau, sebab latar belakang Thamsir adalah seorang birokrat yang lama berkecimpung dalam dunia birokrasi. Oleh sebab itu menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi Thamsir Rahman dalam memimpin Partai Demokrat dalam periode itu.

Langkah konkret yang diambil Thamsir dalam mengakomodasi kepentingan kelompok Jenu itu adalah dengan tetap memasukkan mereka dalam kepengurusan DPD Partai Demokrat Riau, mereka antara lain; Firdaus Basir sebagai wakil ketua, Ridwan Bakar sebagai sekretaris DPD, Sayed Abu Bakar Assegaf sebagai wakil sekretaris dan beberapa orang lainnya yang ditempatkan dalam biro-biro di DPD Partai Demokrat Riau.

Pada awal perjalannya, kepengurusan DPD Partai Demokrat pimpinan HR. Thamsir Rahman itu memang mulus seperti tanpa persoalan terlebih ketika Thamsir mampu mengakomodir seluruh kelompok kepentingan yang bermain di dalam tubuh DPD Partai Demokrat Riau serta mampu menjalin koordinasi yang baik dengan DPC-DPC di seluruh Kabupaten/Kota di Riau. Akan tetapi persoalan mulai muncul ketika Thamsir berniat mencalonkan diri menjadi Gubernur Riau pada Pilgubri tahun 2008. Keinginan Thamsir itu

selain mendapat pertentangan dari beberapa pengurus. Alasan kelompok ini menentang adalah secara kalkulasi Thamsir kalah dan itu membuang energi yang tidak sedikit dari partai. Akan tetapi penolakan dari kelompok itu tidak mengecilkan niat Thamsir untuk maju menjadi Gubernur Riau periode 2008-2013. Dengan berpasangan dengan Taufan Andoso Yakin, Thamsir lolos seleksi KPU dan berhak menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2008-2013.

Kondisi sulit pasca kekalahan dalam Pilgubri tahun 2008 itu membuat Thamsir kehilangan arah terutama dalam menjalankan roda organisasi partai. Banyak program partai yang tidak berjalan serta koordinasi dengan DPC-DPC yang tidak terjalin dengan baik ditambah lagi dengan kurangnya pembinaan dari DPD terhadap DPC-DPC yang berakibat pada timbulnya persoalan internal di DPC-DPC seperti yang terjadi di DPC Partai Demokrat Kota Dumai, DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru dan DPC Partai Demokrat Pelalawan.

Di DPC Partai Demokrat Kota Dumai terjadi dualisme kepemimpinan yang sama-sama memegang SK dari DPD Partai Demokrat Riau. Akibatnya adalah timbul kecurigaan di kalangan pengurus DPC Partai Demokrat Dumai adanya permainan antara pihak-pihak di DPD dengan DPC kelompok yang bertikai, yaitu kelompok Niazi Arief dan kelompok Eko Suharjo. Di Kota Pekanbaru sendiri terjadi reshuffle Sekretaris DPC yang berakibat pada disharmonisasi di tubuh DPC Kota Pekanbaru dan di DPC Pelalawan terjadi kevakuman pimpinan dan tentunya berakibat pada tidak berjalannya program-program kepartaian.

Kondisi itu semakin menyudutkan posisi Thamsir selaku Ketua DPD Partai Demokrat Riau. Selain masalah internal partai itu, Thamsir juga disibukkan dengan adanya pemeriksaan terhadap kasus korupsi yang disangkakan kepadanya. Akibatnya adalah konsolidasi dan koordinasi partai menjadi terhambat serta persiapan partai menghadapi Pemilu 2009 juga terganggu. Di sisi lain, kedudukan Thamsir selaku Ketua DPD semakin digoyang oleh kelompok-kelompok yang kontra dengan Thamsir. Posisi

kelompok itu semakin jelas ketika mereka mendeklarasikan diri sebagai Komite Independen Penyelamat Organisasi.

Komite dan DPC-DPC yang bersepakat melengserkan Thamsir akhirnya memutuskan untuk mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Demokrat Riau pada tanggal 4 November 2009. Musdalub diselenggarakan di Hotel Labersa Pekanbaru yang dihadiri lebih dari 2/3 DPC dan pengurus DPD Partai Demokrat Riau. Musyawarah Daerah Luar Biasa Partai Demokrat Riau memuat keputusan diantaranya;

1. Memberhentikan H.R. Thamsir Rahman dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Riau.
2. Menetapkan H. Zulkifli AS sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Riau.
3. Melanjutkan program kerja partai yang masih terbengkalai pada masa kepemimpinan Thamsir Rahman, dan
4. Meminta kepada ketua terpilih untuk melaksanakan Penggantian Antar Waktu (PAW) posisi Thamsir Rahman dari keanggotannya di DPRD Provinsi Riau.

Hasil Musyawarah Daerah Luar Biasa itu kemudian dituangkan dalam Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau No. ISTIMEWA/FORMATUR/XI/2009 tanggal 14 november 2009 tentang Usulan Pengurus DPD Partai Demokrat Riau kepada DPP Partai Demokrat yang kemudian mendapat balasan dalam Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 127/SK/DPP.PD/DPD/XII/2009 tentang Penetapan Susunan Nama dan Jabatan Pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Riau Periode 2009-2011. Artinya SK Nomor 127/SK/DPP.PD/DPD/XII/2009 itu melanjutkan periodisasi Thamsir Rahman sampai habis masa periode yaitu tahun 2011. Selain itu dalam SK tersebut juga tidak menyebutkan secara rinci tentang reposisi Thamsir Rahman dari keanggotaannya sebagai anggota DPRD Provinsi Riau sebagaimana rekomendasi Musdalub. Dalam artian kasus Thamsir ini hampir mirip dengan kasus yang terjadi dengan Mohd. Jenu karena sama-sama diperkenankan menduduki kursi

keanggotaan legislatif di DPRD Provinsi Riau walaupun dilengserkan dari jabatannya selaku Ketua DPD Partai Demokrat Riau.

Kedudukan Thamsir yang pelik waktu itu membuat Thamsir tidak bisa berbuat banyak ketika beberapa kelompok berhasrat menggulingkannya dari kursi Ketua DPD Partai Demokrat Riau. Thamsir yang terus diburu penebak hukum atas kasus dugaan korupsi APBD INHU periode 2006-2008 kehabisan energi untuk meng-*counter attack* kelompok yang mencoba menjatuhkan dirinya dari kursi Ketua DPD Partai Demokrat Riau. Kelompok pro Thamsir tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menghentikan proses penggulingan Thamsir oleh kelompok Komite Independen Penyeleman Organisasi dan beberapa DPC. Karena situasi yang sulit waktu itu kelompok Thamsir lebih memilih untuk menyelematkan kedudukan Thamsir selaku keanggotaan di DPRD Provinsi Riau karena memang itulah satu-satunya posisi tawar Thamsir waktu itu di Demokrat Riau. Usaha kelompok pro Thamsir itu menuai hasil karena memang Thamsir tidak jadi di PAW-kan oleh Ketua DPD terpilih waktu itu. Selain itu, sebagai ungkapan terimakasih partai terhadap kontribusi Thamsir dalam mengembangkan organisasi Partai Demokrat Riau sejak 2006 sampai 2009 yang dikuatkan dengan perolehan suara yang signifikan Partai Demokrat di Riau terlepas karena pengaruh Thamsir atau bukan.

Kemelut Internal 2009-2010 (Tahap III)

Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Demokrat Riau pada tanggal 4 November 2009 berhasil melengserkan H.R. Thamsir Rahman dari kursi Ketua DPD Partai Demokrat Riau dan memilih Zulkifli AS sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Riau mengalahkan HR. Mambang Mit dengan perbandingan suara 9 untuk Zul AS berbanding 1 suara untuk Mambang Mit. Terpilihnya Zul AS ini sudah diprediksi oleh banyak pihak sebab nama Zul AS disebut-sebut sebagai orang yang berperan dalam mempercepat dilangsungkannya Musdalub Partai Demokrat Riau.

Kepengurusan DPD Partai Demokrat Riau periode 2009-2011 di bawah komando Zulkifli AS yang dilegalisasi dalam SK DPP Partai Demokrat Nomor. 127/SK/DPP.PD/DPD/XII/2009 menempatkan Sayed Abu Bakar Assegaf sebagai Sekretaris DPD Partai Demokrat Riau. Selain itu, dalam kepengurusan dimasukan pula nama HR. Mambang Mit sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) Partai Demokrat Riau. Masuknya nama Mambang Mit ini tentu saja menarik perhatian banyak pihak tidak terkecuali pengurus DPD Partai Demokrat Riau sendiri. Masuknya nama Mambang Mit dalam kepengurusan Majelis Pertimbangan Daerah tentu saja menimbulkan beragam pendapat baik dari kalangan internal kader Partai Demokrat maupun eksternal partai (pengamat politik).

Kekalahan Mambang Mit dalam pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Riau pada Musdalub tahun 2009 dipandang hanyalah sebagai pintu masuk Mambang Mit untuk merebut kursi Ketua DPD Partai Demokrat Riau. Puncaknya adalah pasca kekalahan Zul AS menjadi Walikota Dumai dalam Pilwako Dumai tahun 2010. Dua bulan pasca Pilwako, Zul AS tiba-tiba mengundurkan diri dari kursi Ketua DPD Partai Demokrat Riau tanpa sebab yang jelas. Zul AS hanya beralasan bahwa dengan kekalahan dirinya maju menjadi Walikota Dumai untuk periode kedua menjadi bukti ketidakmampuannya memimpin organisasi Partai Demokrat serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepadanya dan itu menurutnya akan berdampak pada masa depan Partai Demokrat nantinya.

Seiring dengan pengunduran diri Zul AS dari Ketua DPD Partai Demokrat Riau pada pertengahan 2010 itu, akhirnya pengurus DPD Partai Demokrat Riau memutuskan untuk mempercepat Musyawarah Daerah II Partai Demokrat Riau. Dengan masa persiapan yang sangat singkat, Panitia Musda II Partai Demokrat Riau menetapkan Musda II dilangsungkan di Pekanbaru tanggal 23 Agustus 2010 sampai selesai. Musyawarah Daerah II Partai Demokrat itu dilangsungkan di Hotel Aryaduta Pekanbaru yang dihadiri oleh seluruh DPC-DPC, Pengurus, DPP serta pemilik hak suara.

Pada pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Riau untuk periode 2010-2015 terdapat dua orang calon ketua yaitu Mukhniarti Basko dan HR. Mambang Mit. Prosesi pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Riau tentunya tidak lepas dari intrik-intrik politik baik dari calon maupun dari luar.

Melalui mekanisme yang panjang akhirnya pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Riau untuk periode 2010-2015 dilangsungkan dengan *voting* tertutup. Adapun jumlah suara sah adalah 14 suara yang akan diperebutkan oleh dua kandidat itu. Setelah melalui fase-fase yang cukup panjang akhirnya HR. Mambang Mit merebut 10 suara sedangkan Hj. Mukhniarti Basko meraih 4 suara, artinya HR. Mambang Mit memenangkan pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Riau periode 2010-2015.

Analisis Pergeseran Kekuasaan Politik

Konflik internal yang terjadi di tubuh Partai Demokrat Riau menjadi gambaran pengelolaan Partai Demokrat mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Pengelolaan partai yang tidak bersandar pada ideologi yang kokoh serta dibangun di atas pondasi manajerial partai yang rapuh menyebabkan Partai Demokrat rentan akan pertikaian baik internal maupun eksternal partai. Partai Demokrat yang lahir atas inisiasi Soesilo Bambang Yudhoyono ini memang secara prestasi cukup fantastis dengan berhasil memperoleh banyak suara pada dua pemilihan umum yang diikutinya. Akan tetapi prestasi yang baik itu justru menjadi paradoks bagi Partai Demokrat, sebab selain dibayang-bayangi oleh kepentingan elit di internal partai juga dibayangi oleh kegusaran partai politik lain yang notabene telah lama berkecimpung dalam konstelasi politik di Indonesia atas prestasi Partai Demokrat itu.

Pergeseran kekuasaan yang terjadi di DPD Partai Demokrat Riau tidak bisa dilepaskan dari benturan kepentingan elit Partai Demokrat Riau. Dalam artian bahwa jatuh bangunnya kekuasaan ketua DPD Partai Demokrat Riau disebabkan oleh kepentingan elit yang berbenturan antara satu dengan yang lain. Berkennen dengan itu, Sigmund Neuman melihat partai politik sebagai organisasi

yang memusatkan perhatian aktivitasnya untuk menguasai kekuasaan pemerintahan dengan berlomba-lomba untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan para pesaingnya (partai lain).

Karena aktivitas partai politik yang berpusat pada kekuasaan pemerintahan itulah menyebabkan partai politik dalam hal ini Partai Demokrat dengan kegemilangannya dijadikan tameng untuk berkuasa oleh elit-elit tertentu. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila Partai Demokrat dirudung berbagai persoalan perebutan kekuasaan internal (ketua). Orientasi pada kepentingan kekuasaan menyebabkan Ketua DPD Partai Demokrat Riau sejak pertama mengabaikan konsolidasi internal partai. Akibatnya muncul ‘barisan sakit hati’ yang merasa telah berjasa membesarkan Partai Demokrat di Riau namun tidak mendapat penghargaan dari pimpinan Partai Demokrat Riau baik dalam lingkup internal maupun eksternal bahkan cenderung disingkirkan dari Partai Demokrat.

Pergeseran kekuasaan di tubuh Partai Demokrat Riau ibarat pendulum yang bergerak kekiri dan kekanan. Pendulum kiri diibaratkan sebagai kelompok oposisi dan pendulum kanan diibaratkan sebagai kelompok yang pro terhadap status quo. Pendulum pertama (kemelut internal tahap I) dipandang bergerak kekiri karena menuntut mundurnya Mohd. Jenu dari kursi ketua DPD Partai Demokrat Riau yang diwakili oleh Yusrizal Tanjung dan kawan-kawan. Pendulum kedua (kemelut internal tahap II) dipandang bergerak kekanan karena tuntutan mundurnya Thamsir dimobilisasi oleh kepentingan kelompok yang sebelumnya pro kepada Jenu. Pendulum ketiga (kemelut internal tahap III) dipandang bergerak lagi kekiri karena kelompok pro Thamsir tidak puas dengan pelengseran Thamsir. Oleh sebab itu kemudian Zul As yang dianggap representasi dari kelompok pendulum kanan dilengserkan dari kursi ketua DPD Partai Demokrat Riau. Pendulum ini diprediksi akan terus bergerak mencari titik kesimbangan sehingga secara organisasional Partai Demokrat benar-benar kokoh.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pergeseran Kekuasaan Politik

Faktor Internal

Item-item pembentuk konflik itu adalah refleksi dari lingkungan internal yang ada di DPD Partai Demokrat Provinsi Riau kurun waktu 2004-2009.

1. Ketidakcocokan Pribadi

Timbulnya konflik di DPD Partai Demokrat Riau adalah persoalan yang berakar dari disharmonisasi antar elite yang ada di DPD Partai Demokrat Riau. Disharmonisasi ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari faktor tidak terakomodirnya kepentingan elite yang ada di DPD Partai Demokrat Riau. Ketidakcocokan pribadi dalam hal ini menjadikan kelompok-kelompok yang termuat dalam faksi-faksi di DPD Partai Demokrat Riau saling curiga dan akhirnya menyulut pada persoalan ketidakpercayaan kepada pimpinan yang juga terjebak dalam faksi-faksi itu. Faksi-faksi yang berkonflik itu antara lain; pada periode 2003-2004 yang berkonflik adalah faksi Mohd. Jenu dengan faksi Ir. Yusrizal Tanjung. Kemudian pada periode 2006-2009 yang berkonflik adalah faksi Sayed Abu Bakar Assegaf (yang sebelumnya tergabung dalam faksi Jenu) melawan faksi pendukung Thamsir. Terakhir adalah pada periode 2009-2010 yaitu pertentangan antara faksi Ir. Yusrizal Tanjung dengan faksi Zul AS (faksi Zul AS masih digalang oleh Sayed Abu Bakar Assegaf dan kawan-kawan).

2. Perbedaan Sistem Nilai

Sistem nilai yang dimaksudkan disini adalah pola-pola pendistribusian tugas-tugas dan fungsi dari setiap unsur yang ada di tubuh DPD Partai Demokrat Riau. Permasalahan kemudian muncul ketika pendistribusian itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki atau tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki karena pada dasarnya pemimpin-pemimpin dalam tubuh DPD Partai Demokrat Riau itu sendiri masih belum bisa *fair* dalam meletakkan orang-orang pada jabatan yang sesuai. Artinya timbul persengkokolan dari beberapa elit dalam merumuskan struktur organisasi partai dan inilah yang menyulut pelengseran Mohd. Jenu pada tahun 2004.

3. Persaingan

Faktor ini jelas merupakan salah satu penyebab lahirnya konflik internal DPD Partai Demokrat Riau, hal ini dapat dilihat dari awal ketika terjadi konflik antara kubu Mohd. Jenu dengan kubu Yusrizal Tanjung dan kawan-kawan. Reshuffle kepengurusan tanpa musyawarah menjadi pemicu utama persaingan antar kubu ini akibatnya adalah kekuatan politik internal yang digalang oleh kubu Yusrizal Tanjung yang mengatasnamakan Dewan Penyelamat berhasil melengserkan Mohd. Jenu dari kursi Ketua DPD Partai Demokrat Riau. Sedangkan pada proses penggulingan Thamsir lebih disebabkan karena persaingan antara kubu Thamsir dengan kubu Sayed yang sedikit di anak tirikan ketika Thamsir memimpin Partai Demokrat Riau.

4. Ketidakjelasan Batas-Batas Wewenang dan Tanggung Jawab

Faktor ini menjadi alasan pelengseran Jenu yaitu ketika Jenu mencairkan cek sejumlah Rp. 34.000.000,- serta mengganti komposisi pengurus DPD Partai Demokrat Riau. Jenu dipandang tidak mampu menjalankan roda organisasi dengan baik. Jenu menjalankan roda organisasi seperti sebuah perusahaan oleh sebab itu timbul ketidakpuasan dari pengurus yang lain terhadap kepemimpinan Jenu itu. Pada dasarnya persoalan konflik yang disebabkan oleh faktor ini juga tidak jauh berbeda dari sebelumnya sebab yang menjadi akar persoalan adalah Inkonsistensi dari para elite yang ada di DPD Partai Demokrat Riau itu sendiri.

Selain faktor-faktor internal di atas, secara umum, masih ada 2 faktor internal penyebab lahirnya konflik internal DPD Partai Demokrat Riau, faktor itu antara lain:

1. Sistem Kaderisasi Yang Tidak Jalan

Sistem kaderisasi yang tidak jalan dalam tubuh partai politik termasuk dalam hal ini yang terjadi di DPD Partai Demokrat Riau dipandang sebagai salah satu faktor penyebab pelengseran kekuasaan Ketua DPD Partai Demokrat Riau. Kaderisasi instan dengan memilih orang-orang yang berada di luar partai yang kemudian direkrut dengan singkat tanpa melalui pendidikan politik

serta orientasi kepartaihan yang baik menyebabkan partai politik kehilangan arah dan miskin ideologi dalam diri kader termasuk yang terjadi di DPD Partai Demokrat Riau.

Ketua-ketua yang dilengserkan itu antara lain Mohd. Jenu dipilih dari luar partai dan menjadi ketua tanpa melalui mekanisme pendidikan politik kader. Kemudian HR. Thamsir Rahman juga sangat jelas merupakan sosok birokrat yang terpilih menjadi Ketua DPD Partai Demokrat tanpa proses pendidikan politik (kaderisasi) dari partai. Selanjutnya adalah Zul AS sejatinya bukan kader demokrat akan tetapi karena kedudukannya yang strategis sebagai Walikota waktu itu dipilihlah Zul AS sebagai Ketua DPD Partai Demokrat. Terakhir adalah HR. Mambang Mit, walaupun tokoh senior dalam birokrasi akan tetapi dinamika dalam tubuh partai politik sangat berbeda dengan birokrasi.

2. Lemahnya Kepemimpinan dalam Pengelolaan Konflik

Konflik atau perpecahan dalam sebuah Parpol salah satu penyebabnya adalah masalah pengelolaan atau manajemen konflik yang tidak baik. Sebagai suatu organisasi modern, Parpol dituntut untuk mengembangkan etika berpartai secara modern. Termasuk di dalamnya etika kepemimpinan yang demokratis dan kolegikal, etika berorganisasi atas dasar distribusi kekuasaan yang terdiferensiasi, dan etika pertanggung-jawaban kepada publik yang semuanya dilembagakan melalui mekanisme partai yang disepakati bersama.

Melalui pelembagaan etika berpartai semacam itu, Parpol tidak hanya diharapkan menjadi wadah pendidikan politik dan pembentukan kepemimpinan tetapi juga bisa menjadi basis sekaligus pondasi bagi pelembagaan demokrasi pada tingkat nasional. Ironisnya, meski ada mekanisme internal yang dilembagakan dalam bentuk AD/ART, partai-partai terperangkap dalam kelompok “perkoncoan” politik yang hanya berorientasi kekuasaan, sehingga AD/ART sebagai konstitusi internal partai hanya diperlukan sebagai pajangan belaka.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menyebabkan pergeseran kekuasaan politik di DPD Partai Demokrat Riau antara lain:

1. Pengaruh pemberitaan media massa terhadap polemik yang terjadi.
2. Pengaruh partai lain yang cemas terhadap perkembangan partai tidak hanya di Riau termasuk di pusat.
3. Pengaruh kelompok-kelompok kepentingan yang mengambil keuntungan dibalik polemik di DPD Partai Demokrat Riau, dan
4. Minimnya pembinaan dari DPP terhadap DPD-DPD dan DPC-DPC termasuk di Riau.

SIMPULAN

Dinamika pergeseran kekuasaan yang terjadi di DPD Partai Demokrat Riau itu adalah murni konflik internal, sehingga penyelesaian yang dilakukan adalah melalui musyawarah partai baik musyawarah daerah, musyawarah daerah luar biasa partai, maupun melalui rapat koordinasi partai. Kelompok-kelompok yang berkonflik itu adalah kelompok lama yang mereka fragmentasikan dalam perebutan kekuasaan Ketua DPD Partai Demokrat Riau walaupun bukan figure dari kelompok mereka. Sebab-sebab konflik internal sehingga terjadi pelengseran kekuasaan yaitu sebab internal yang diindikasikan oleh adanya ketidak cocokan pribadi, perbedaan sistem nilai, persaingan, ketidakjelasan batas-batas wewenang dan tanggung jawab, serta adanya sebab eksternal yang diindikasikan karena adanya pengaruh pemberitaan media massa terhadap polemik yang terjadi, pengaruh partai lain yang cemas terhadap perkembangan partai tidak hanya di Riau termasuk di pusat, pengaruh kelompok-kelompok kepentingan yang mengambil keuntungan dibalik polemik, dan minimnya pembinaan dari DPP terhadap DPD-DPD dan DPC-DPC termasuk di Riau.

DAFTAR RUJUKAN

Akbar Tanjung, 2007. *The Golkar Way, Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

- Bambang Cipto, 1996. *Prospek dan Tantangan Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bobby Triadi, 2010. *Kilas Balik 9 Tahun Partai Demokrat*. Jakarta: Majalah Demokrat-Dian Rakyat.
- Dean G Pruitt, dan Jeffrey Z Robin. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Doyle Paul Johnson, 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Eddy Wibowo dkk, 2004. *Ilmu Politik Kontemporer*. Yogyakarta: YPAPI.
- Eka Vidia Putra, 2009. *Elit dan Politik Identitas*. Salatiga: Percik.
- Eric R. Peasant Wolf, 1975. *Broker Politic*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Firmansyah, 2011. *Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Giovanni Sartori, 1976. *Parties and Party System: A Framework for Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press
- Ichlasul Amal (ed), 1996. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ishak, 2010. *Posisi Politik Masyarakat dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penaku.
- Maswadi Rauf. 2001. *Konsensus dan Konflik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Dikti Depdiknas.
- Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Miriam Budiardjo, 1998. *Partisipasi dan Partai Politik; Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia
- MHR. Songge, 2000. *Krisis Sosial*, Mingguan Pesan, No. 89/Th.II/09/2000.
- Pahmy Sy, 2010. *Politik Pencitraan*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Robert Dahl. 1977. *Modern Political Analysis*. New Delhi: Prentice-Hall Of India Private Ltd.
- Sohidin. 2004. *Kala Demokrasi Melahirkan Anarkhi*. Jakarta: Lageng Pustaka.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Usman Ali, 2003. *Partai Politik dan Kebijakan-Kebijakan*. Bandung: Grafindo.